

Belajar dari (Pajak) Mangkunegaran

Tata kelola pajak Mangkunegaran lumayan bagus. Pernyataan ini dipergoki dalam penerapan pajak penghasilan. Pajak ini ditujukan pada rakyat maupun perkumpulan yang berbisnis meraup laba.



Heri Priyatmoko
Dosen Sejarah, Universitas Sanata Dharma
Sejarawan Solo

Pajak). Tanggungjawab ditunaiakan dibantu seorang ahli dalam menyerahkan seluruh uang pajak ke kantor kas negara.

Lakinya masa sekarang, ternyata *isopo dlowo* telah lahir pajak bumi. Saban desa di area Mangkunegaran menanggung pajak sawah, tegalan, dan pekarangan. Sebelum turan lapangan, petugas menaburkan pemungutan ini dan dicatat dalam *kokir* (surat pajak). Tercatat pula pajak tanah dalam kota untuk menggaji para penjaga kampung, penyiap jalan, hura kampung dan tukang lam-

kerja wajib. Pasca reorganisasi agraria, rakyat memiliki tanah secara individu. Selepas mengotongi lirin kepemilikan tanah dari Mangkunegara atau Bupati Patih, mereka dibebani pekerjaan negara dan desa ataupun bekerja di perusahaan Eropa seperti *Jepa patrof* (menjaga keamanan kampung) dan *gagar gawung* (gotong royong) untuk kepentingan istana. Yang membolos, dipanjar kurungan atau membayar sejumlah uang. Bila tetap ingkar, hak kepemilikan tanah dan rumahnya terpaksa dicabut.

rumah, tanah, pemeliharaan, dan sebagainya yang tidak termasuk uang dari hasil menyewakan atau pajak bumi. Sedangkan harta tidak tetap ialah bunga dari uang yang tidak dijalankan dengan dibelikan harta tetap atau untuk usaha seperti bunga dari hasil potang, pembagian laba serta bunga dari surat *asandak*, obligasi atau *effektif* lainnya. Merangkainya jumlah uang yang tertulis pada surat obligasi dan penerimaan surat itu tidak disetorkan oleh pemegang surat, dianggap sebagai harta tidak tetap.

3 bulan usai menerima surat pemberitahuan pajak.

Jangan dikira desk itu tidak ada pajak tontolan, seperti pertandingan, dansa, opera, konser, serta semua tontolan apapun bentuknya yang diadakan sendiri atau kolektif serta didatangi orang dengan membayar. Panitia liburan dipungut pajak sebesar 25% dari harga karis yang sudah sepepetahannya pegawai gubernur atau petugas yang membawahi. Ongkos karis musik empat sen, misalnya, maka pajak yang dibayar satu sen. Tapi, tontolan untuk kegiatan sosial atau kepentingan publik tidak dikenakan pajak. Begitu juga harga karis yang ditetapkan kurang dari empat sen. Kalau pajak tontolan belum dibayar, pemerintah melarang mereka menggelar usaha kecuali telah berjalan 1 hari dan bukan pada hari libur.

Dari pembacauan arsip, pemasukan kas Mangkunegaran yang berasal dari pajak memang tidak terlalu besar. Namun, hal ini tetap membantu keberlangsungan perekonomian Mangkunegaran. Penghasilan dari pajak yang digabungkan dengan pemasukan dari perusahaan perkebunan, menyokong program membangun pajak, termasuk pembangunan jalan dan jembatan di pra Mangkunegaran. Penguasa Mangkunegaran sendiri dalam membangun wilayahnya dan moorer ke pelonok negeri.

Catatan historis di atas membuktikan betapa sistem keuangan Mangkunegaran tradisional sudah rapi dan jelas. Di samping itu, sebagai kaca berraga. Masyarakat Indonesia kudu menyadari bahwa sektor pajak merupakan pos pendapatan abadi negara untuk mendukung program pemerintah, seperti pelayanan di segala ini. Di sinilah, diperlukan kreidilasan dan kesaduran masyarakat yang tinggi untuk rajin membayar pajak dan tepat waktu. Bulan Maret segera beranjak, Anda sudah lapor SPT tahunan?

Maret merupakan bulan dimana pihak wajib pajak *Biluber-oberff* Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melaporkan SPT tahunan. Timbal guyonan di kalangan para wajib pajak, termasuk barisan, penulis yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bahwa tidak ada yang gratis di Indonesia. Hampir sebah penduduk Indonesia terbebani pajak.

Sejarah global menyeronjkan bukti, upaya membangun negara tak lepas berbekal ideologi, kekuatan militer, dan kabinet pemerintahan yang tangguh. Pajak merupakan pal dasar pergerak roda pemerintahan. Bahkan, sekelas praja Mangkunegaran sebagai kerajaan tergemuk di Jawa lantaran sukses mendayung bisnis pabrik gula, saat itu tetap narik pajak ke masyarakat. Kisah lama tentang Mangkunegaran berjabaku mengoroti pajak, belum ditendus publik.

Beruntunglah peneliti bertungkus lumus menyimak arsip berbede di perpustakaan Reko Pustaka. Kabar dari masa lampau terurus, dan menjadi cermin di era kekinian. Tanggal 27 Maret 1914 petinggi Mangkunegaran mengeluarkan pusuatan perihal pengelolan pajak. Pemerintah Walanda sebagai penguasa berbagai istana di Hindia Belanda, mengelontakan lirin pada Gusti Mangkunegara untuk memungut pajak dari orang pribumi yang berkeduk di telatah Mangkunegaran. Dibentuk petugas penarik pajak di Mangkunegaran disebut *Mantri Martanimpuna* (Kantor Inspektur



Doc

pa jalan. Rumah pangeran, *patwa dawo* (anak raja) dan kerabat raja dibebaskan dari beban pajak.

Tak hanya itu, dalam dokumen terpacok pajak tanah asing. Mengapa? Secara teoritis, raja adalah penguasa atas seluruh tanah di wilayahnya, sehingga berhak menyewakan tanah pada orang asing yang hendak membuka usaha perkebunan. Besarnya pajak didasarkan pada tafsiran banyaknya sewa dalam setiap tahunnya.

Terinspirasi Thomas Raffles, Praja Mangkunegaran mengoroti pajak kepala yang diundangkan lewat *Rijksoff* tahun 1818. Pajak dikenakan untuk warga pribumi yang punya tanah pekarangan atau kebun di area Mangkunegaran. Semula, pajak tersebut berupa

Kelompok yang luput dari beban pajak ini, yakni pembesar trah Mangkunegaran atau para *putra senosa*, pegawai Mangkunegaran, pegawai Kasunanan dan gubernur Hindia Belanda, guru agama dan pengurus masjid Mangkunegaran, paksioco makan labuhat, penunjam pegawai dan militer gubernemen, juru tulis Mangkunegaran, orang cacat, orang jompo, dan janda miskin.

Tata kelola pajak Mangkunegaran lumayan bagus. Pernyataan ini dipergoki dalam penerapan pajak penghasilan. Pajak ini ditujukan pada rakyat maupun perkumpulan yang berbisnis meraup laba. Dalam pajak itu, telah muncul term harta tetap dan harta tidak tetap. Definisi harta tetap adalah keuntungan dari

Pengeluaran yang tidak dipungut pajak ini antara lain, hasil dari tanah yang tidak dikawal pajak *landrent*; tempat tinggal para militer yang berpangkat di bawah *Onder Lintan* selama tak punya rumah sendiri; biaya pemeliharaan kendaraan untuk berdinai; hadiah yang diterima militer di luar gajinya. Bila wajib pajak mengalami kerugian, maka kerugian itu dikurangi dalam pengelolan bersih dalam waktu 2 tahun. Kalau keberatan terhadap beban pajak, boleh memohon keringanan kepada komisi serta Bupati Patih dalam waktu

Pendapat, informasi, tulisan opini, dibubarkan tema-tema Duranata, dan sebagainya. Tulisan merupakan hak karya sendiri dan bukan atau tidak dibagikan ke media lain. Untuk pengajuan 6.000 karakter, dengan alamat dan foto atau ke: opini@joglosemar.com. Lengkap identitas diri, foto dalam pose santai, nomor rekening dan nomor telepon. Jika dalam waktu dua pekan tulisan belum dituntut, otomatis penulis berhak memusnahkan tulisan tersebut.